



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 24 TAHUN 2023**

**TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 57);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 72), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor

- 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 235);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 79);
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD daerah dan mengacu pada RKP Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2024.

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di lingkup dinas dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah disusun bertujuan untuk :

- a. pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024; dan
- b. pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah Tahun 2024.

Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan RKPD Tahun 2024.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.
- (3) Memperhatikan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- (4) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinput pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Pasal 5

Kepala Perangkat Daerah menjaga kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2024.

Pasal 6

- (1) Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023;
 - c. BAB III Tujuan dan Sasaran;
 - d. BAB IV Rencana kerja dan Pendanaan; dan
 - e. BAB V Penutup.
- (2) Penjabaran Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Renja Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan Renja Perangkat Daerah;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap Renja Perangkat Daerah; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyusun laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dan hasil Renja Perangkat Daerah secara berkala setiap triwulan untuk dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bapedalitbang.
- (4) Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dan hasil Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi

masuk dan bahan pertimbangan untuk analisis usulan program dan kegiatan pada tahun berikutnya.

Pasal 8

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima surat edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (3) Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada :
 - c. Perubahan RKPD Tahun 2024; dan
 - d. hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 4 Agustus 2023
BUPATI PESIR SELATAN,



Diundangkan di Painan
Pada tanggal 4 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESIR SELATAN,



MAWARDI ROSKA
BERITA DAERAH KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 24

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024



DPMDPPKB

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**



bkkbn

RENCANA KERJA TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas karunianya dapat menyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 telah berhasil disusun.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) mewajibkan setiap Kementerian ataupun Lembaga untuk dapat menyusun Rencana Kerja Tahunan yang memuat program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu satu tahun. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan telah merespon Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut, sehingga dapat tersusun dengan baik.

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan ini, menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan sebagai unit kerja perencanaan dengan berbasis pada kinerja yang terukur guna memudahkan dalam penyusunan laporan.

Demikian disampaikan semoga dokumen penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan dapat bermanfaat dan digunakan sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Painan, 4 Agustus 2023

KEPALA DINAS,

ZULKIFLI, S.Sos.
NIP.19690218 1993 03 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1. Latar Belakang 1

 1.2. Landasan Hukum 3

 1.3. Maksud dan Tujuan 5

 1.3.1. Maksud 5

 1.3.2. Tujuan 5

 1.4. Sistematika Penulisan 6

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS TAHUN 2023 8

 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 8

 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 22

 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 35

 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 35

 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 44

BAB III TUJUAN DAN SASARAN 48

 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 48

 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 48

 3.2.1. Tujuan 48

 3.2.2. Sasaran 49

 3.3. Program dan Kegiatan 49

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 63

 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 63

BAB V PENUTUP 71

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (tahun berjalan) Kabupaten Pesisir Selatan 10

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan 24

Tabel 2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Pesisir Selatan 36

Tabel 2.4. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Pesisir Selatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan 45

Tabel 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Pesisir Selatan 52

Tabel 4.1. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 65

Tabel 4.2. Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2024 66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap tahun Kepala Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 disusun dengan maksud agar dapat menjadi panduan Perangkat Daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024, serta juga sebagai bahan sinkronisasi terhadap program dan kegiatan dalam RKPD dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada Tahun 2024.

Proses penyusunan Rencana Kerja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 2 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten/Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD

dan Renja OPD yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan. Sebagai dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana kerja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan strategis, yaitu : menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah berfungsi menjabarkan Rencana Strategis ke dalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah, program dan kegiatan Perangkat Daerah. Sebagai rencana operasional dan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk mensukseskan program dan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan kedudukan, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, menyatukan visi dan misi, persepsi, strategi seluruh aparatur Pemerintahan dalam membina, melayani, memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, kinerja Perangkat Daerah ditahun-tahun sebelumnya dan meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Perangkat Daerah.

Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024, merupakan program dan kegiatan prioritas yang telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 86 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026, yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2024. Adapun keberhasilan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini tidak bisa lepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak yang terlibat, termasuk peran serta masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;

7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 57);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 79);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 238);
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 86 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 adalah untuk memberikan landasan dalam menyusun program dan kegiatan membantu kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 serta menentukan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2024. Rencana Kerja disusun dengan maksud dapat dijadikan panduan pencapaian target kinerja dalam Indikator Kinerja Utama Dinas yang terdapat Sasaran Strategis Dinas sampai akhir Tahun 2024, yaitu :

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja;
2. Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah;
3. Terwujudnya Keluarga Bahagia;

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 ini adalah :

- a. Penjabaran program dan kegiatan dan tolak ukur capaian target kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis lima tahunan ke dalam periode satu Tahun Anggaran 2024;
- b. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. Acuan dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk Tahun Anggaran 2024;
- d. Bahan monitoring dan evaluasi Renja Dinas Tahun 2024;
- e. Panduan pencapaian target kinerja dengan Perjanjian Kinerja mulai dari Eselon II, III, IV, Fungsional sampai dengan ke Staf dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pencapaian target kinerja dengan memprioritaskan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum atau latar belakang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Keterkaitan antara Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD yang mengacu kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai regulasi pendukung penyusunan Rencana Kerja, landasan hukum terkait Rencana Kerja, penjelasan tentang maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA DINAS TAHUN 2023

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun 2022) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2023), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini menerangkan tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada Tahun Anggaran 2024 berdasarkan program dan kegiatan yang diusulkan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Bab ini menjelaskan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024, berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan serta sumber pendanaannya.

BAB V. PENUTUP

Pada bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian dan lembar terakhir tentang pengesahan oleh Kepala Perangkat Daerah.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya.

Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja tersebut meliputi tiga hal, yaitu : kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan. Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

- a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan s/d Tahun 2023 (tahun berjalan). Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel T-C.29 yang disesuaikan dengan Perangkat Daerah masing-masing, dengan format tabel sebagaimana Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (tahun berjalan) Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

Tabel T-C.29

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (tahun berjalan)*
Kabupaten Pesisir Selatan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program/ (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Pengukuran Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Daerah dilaksanakan	100	70	75	74	98,67%	80	80	80%
2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100	70	75	75	100%	80	100	100%
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12	12	12	12	100%	12	12	100,00%
2	13	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Bulan Pembayaran Honor ASN yang dibayarkan	12	12	12	12	100%	12	12	100,00%
2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Perangkat Daerah	100	70	75	75	100%	80	76	76%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program/ (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Pengukuran Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	13	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4	3	3	3	100%	3	3	75%
2	13	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	10	2	2	2	100%	10	8	80,00%
2	13	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Logistik Kantor disediakan	12	12	12	12	100%	12	8	66,67%
2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan Jenis Barang Cetak dan Penggandaan disediakan	12	12	12	12	100%	12	8	66,67%
2	13	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan	3	3	3	3	100%	3	3	100%
2	13	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Bulan Pelayanan Tamu dan Rapat-Rapat	12	12	12	12	100%	12	8	66,67%
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Koordinasi dan Konsultasi	12	12	12	12	100%	12	8	66,67%
2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Daerah	100	70	75	74	98,67%	80	78	78%
2	13	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Tagihan Air, PDAM, PLN, Internet, Telpo yang dibayarkan	12	12	12	12	100%	12	8	66,67%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program/ (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Pengukuran Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	13	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan Umum Kantor tersedia	7	7	7	7	100%	7	7	100%
2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100	70	75	75	100%	80	78	78%
2	13	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12	12	12	12	100%	12	8	66,67%
2	13	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Bulan Operasional Pemeliharaan Kendaraan Perorangan dan Dinas	12	12	12	12	100%	12	8	66,67%
2	13	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor	12	12	12	12	100%	12	8	66,67%
2	13	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	12	12	12	12	100%	12	8	66,67%
2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	85	54	60	48	80%	65	63	74,12%
2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa	Jumlah kerja sama antar desa	14	4	4	2	50%	10	10	71,43%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program/ (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Pengukuran Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	13	03	2.01	02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Perguruan Tinggi yang difasilitasi KKNnya	5	5	0	0	0%	3	4	80%
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Nagari yang memiliki pengelolaan administrasi yang baik	100	65	75	70	93%	80	75	75%
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	182	182	182	182	100%	182	182	100%
2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah BPJS Aparatur Nagari yang terbiayai	182	182	182	182	100%	182	182	100%
2	13	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Tersusunnya RKP dan RPJM Nagari	75	30	25	25	100%	40	38	50,67%
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Nagari yang dilakukan Pembinaan Keuangannya	182	0	182	182	100%	182	182	100%
2	13	04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Nagari yang dilatih	48	0	0	0	0%	46	23	47,92%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program/ (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Pengukuran Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa	Jumlah Anggota BUMNag yang dilatih	60	5	5	3	60%	40	37	61,67%
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Dokumen Data Profil dan IDM Nagari	38	0	31	31	100%	36	30	78,95%
2	13	04	2.01	12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Administrasi Nagari yang dibina	20	0	0	0	0%	20	10	50%
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah Desa Wisma Maju	630	545	575	575	100%	580	555	88,10%
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelembagaan Masyarakat yang aktif	350	100	150	150	100%	150	145	41,43%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program/ (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Pengukuran Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	13	05	2.01	01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah KAN yang dibina	37	8	37	29	78,38%	37	30	81,08%
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Kelembagaan Masyarakat Desa yang dibina	182	0	182	182	100%	182	182	100%
2	13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah KP-SPAMS yang dibina	50	6	2	1	50%	50	30	60%
2	13	05	2.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Pencanaan BBGRM dan persentase Partisipasi Masyarakat dalam BBGRM	1	0	1	1	100%	1	1	100%
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelembagaan Nagari yang dibina	90	10	10	10	100%	20	20	22,22%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program/ (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Pengukuran Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,90	1,57	1,45	1,45	100%	1,35	0,87	96,67%
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk	12	0	0	0	0%	12	8	66,67%
2	14	02	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Cetak Data Keluarga Beresiko Stunting	549	0	0	0	0%	549	549	100%
2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Manajemen Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12	0	0	0	0%	12	8	66,67%
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,75	2,83	2,82	2,82	100%	2,81	2,73	99,27%
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Jenis Media KIE yang diadakan	7	3	3	3	100%	4	4	57,14%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program/ (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Pengukuran Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	14	03	2.01	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terpilainya Dua Pasang Duta Genre	1	1	1	1	100%	1	1	100%
2	14	03	2.01	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Angka Kelahiran Total (TFR)	12	0	0	0	0%	12	8	66,67%
2	14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Pengadaan Operasional Balai Penyuluhan KKBPK	15	15	15	15	100%	15	15	100%
2	14	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK	Masyarakat dan Generasi Muda	12	0	0	0	0%	12	8	66,67%
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Petugas Penyuluh Lapangan	54	54	54	54	100%	54	54	100%
2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Pembinaan Kader IMP	60	25	60	60	100%	60	60	100%
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pendistribusian Obat ke FKTL dan FKTP	33	32	33	33	100%	33	33	100%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program/ (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Pengukuran Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah obat di distribusikan ke FKTL dan FKTP	12	12	12	12	100%	12	8	66,67%
2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Aseptor KB Pelayanan MKJP	1500	250	1500	1325	88,33%	1500	1325	88,33%
2	14	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12	12	12	12	100%	12	8	66,67%
2	14	03	2.03	13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang mendapat Peningkatan Kesertaan KB Pria	15	3	3	3	100%	3	0	0,00%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program/ (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Pengukuran Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi KB yang dibina	31	12	31	31	100%	31	31	100%
2	14	03	2.04	04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang dibina	31	12	31	31	100%	31	31	100%
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga Sejahtera	67	46	55	48	87,27%	57,5	57,5	85,82%
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	8	5	8	7	87,50%	8	8	100%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program/ (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Pengukuran Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	14	04	2.01	14	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dan Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	58523	0	0	0	0,00%	58523	52100	89,02%

Sumber Data : Dokumen DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan Tahun 2023

Painan, 4 Agustus 2023

KEPALA DINAS,



ZULKIFLI, S.Sos.

NIP.19690218 1993 03 1 003

Dari Tabel T-C.29 atau Tabel 2.1. diatas untuk masing-masing program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan dua Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, yaitu : Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota target program dan kegiatan renja tahun 2023 adalah 80%, untuk pengukuran realisasi capaian target renstra tahun berjalan yang terdiri dari realisasi capaian program dan kegiatan tahun 2023 adalah 76% serta terdapat tingkat capaian realisasi target renstra tahun 2023 adalah 76%.
2. Program Peningkatan Kerjasama Desa target program dan kegiatan renja tahun 2023 adalah 65%, untuk pengukuran realisasi capaian target renstra tahun berjalan yang terdiri dari realisasi capaian program dan kegiatan tahun 2023 adalah 63% serta terdapat tingkat capaian realisasi target renstra tahun 2023 adalah 74,12%.
3. Program Administrasi Pemerintahan Desa target program dan kegiatan renja tahun 2023 adalah 80%, untuk pengukuran realisasi capaian target renstra tahun berjalan yang terdiri dari realisasi capaian program dan kegiatan tahun 2023 adalah 75% serta terdapat tingkat capaian realisasi target renstra tahun 2023 adalah 75%.
4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat target program dan kegiatan renja tahun 2023 adalah 580 kelembagaan, untuk pengukuran realisasi capaian target renstra tahun berjalan yang terdiri dari realisasi capaian program dan kegiatan tahun 2023 adalah 555 kelembagaan serta terdapat tingkat capaian realisasi target renstra tahun 2023 adalah 88,10%.

5. Program Pengendalian Penduduk target program dan kegiatan renja tahun 2023 adalah 1,35%, untuk pengukuran realisasi capaian target renstra tahun berjalan yang terdiri dari realisasi capaian program dan kegiatan tahun 2023 adalah 0,87% serta terdapat tingkat capaian realisasi target renstra tahun 2023 adalah 96,67%.
6. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) target program dan kegiatan renja tahun 2023 adalah 2,81%, untuk pengukuran realisasi capaian target renstra tahun berjalan yang terdiri dari realisasi capaian program dan kegiatan tahun 2023 adalah 2,73% serta terdapat tingkat capaian realisasi target renstra tahun 2023 adalah 99,27%.
7. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) target program dan kegiatan renja tahun 2023 adalah 57,5%, untuk pengukuran realisasi capaian target renstra tahun berjalan yang terdiri dari realisasi capaian program dan kegiatan tahun 2023 adalah 57,5% serta terdapat tingkat capaian realisasi target renstra tahun 2023 adalah 85,82%.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dalam mencapai kinerja pelayanan Perangkat Daerah untuk menciptakan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dalam arti Pemerintahan yang bersih (jujur), terbuka (trasparan) dan bertanggungjawab diperlukan analisis kinerja pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan dalam analisis kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan dua Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, yaitu : Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel T-C.30 sebagaimana Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

Tabel T-C.30

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Pesisir Selatan

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (Thn n-2)	Tahun 2022 (Thn n-1)	Tahun 2023 (Thn n)	Tahun 2024 (Thn n+1)	Tahun 2021 (Thn n-2)	Tahun 2022 (Thn n-1)	Tahun 2023 (Thn n)	Tahun 2024 (Thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I.	Persentase Penunjang Urusan Daerah dilaksanakan			70%	75%	80%	85%	70%	75%	80%	85%	
1.	Persentase Tertibnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.1.	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			35 Orang / Bulan	36 Orang / Bulan	37 Orang / Bulan	38 Orang / Bulan	35 Orang / Bulan	36 Orang / Bulan	37 Orang / Bulan	38 Orang / Bulan	
1.2.	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	
2.	Persentase Tertibnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-	-	70%	70%	-	-	70%	70%	
2.1.	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			-	-	1 Paket	1 Paket	-	-	1 Paket	1 Paket	
3.	Persentase Tertibnya Administrasi Umum Perangkat Daerah			75%	80%	85%	90%	75%	80%	85%	90%	
3.1.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan			4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (Thn n-2)	Tahun 2022 (Thn n-1)	Tahun 2023 (Thn n)	Tahun 2024 (Thn n+1)	Tahun 2021 (Thn n-2)	Tahun 2022 (Thn n-1)	Tahun 2023 (Thn n)	Tahun 2024 (Thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3.2.	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			-	2 Paket	2 Paket	3 Paket	-	2 Paket	2 Paket	3 Paket	
3.3.	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	
3.4.	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			3 Paket	3 Paket	4 Paket	5 Paket	3 Paket	3 Paket	4 Paket	5 Paket	
3.5.	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	
3.6.	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	
3.7.	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	
4.	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik			-	-	70%	75%	-	-	70%	75%	
4.1.	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			-	-	1 Paket	2 Paket	-	-	1 Paket	2 Paket	
5.	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5.1.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (Thn n-2)	Tahun 2022 (Thn n-1)	Tahun 2023 (Thn n)	Tahun 2024 (Thn n+1)	Tahun 2021 (Thn n-2)	Tahun 2022 (Thn n-1)	Tahun 2023 (Thn n)	Tahun 2024 (Thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.2.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	
6.	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik			70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	
6.1.	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			-	-	1 Unit	1 Unit	-	-	1 Unit	1 Unit	
6.2.	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			70 Unit	70 Unit	69 Unit	69 Unit	70 Unit	70 Unit	69 Unit	69 Unit	
6.3.	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			22 Unit	22 Unit	22 Unit	25 Unit	22 Unit	22 Unit	22 Unit	25 Unit	
6.4.	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			-	-	1 Unit	1 Unit	-	-	1 Unit	1 Unit	
II.	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa			60 Nagari	65 Nagari	70 Nagari	75 Nagari	48 Nagari	50 Nagari	70 Nagari	75 Nagari	
1.	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa			4 Nagari	4 Nagari	182 Nagari	182 Nagari	2 Nagari	3 Nagari	182 Nagari	182 Nagari	
1.1.	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	15 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	15 Dokumen	

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (Thn n-2)	Tahun 2022 (Thn n-1)	Tahun 2023 (Thn n)	Tahun 2024 (Thn n+1)	Tahun 2021 (Thn n-2)	Tahun 2022 (Thn n-1)	Tahun 2023 (Thn n)	Tahun 2024 (Thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
III.	Persentase Nagari yang memiliki pengelolaan administrasi yang baik			80%	85%	90%	95%	80%	85%	90%	95%	
1.	Persentase Nagari yang memiliki pengelolaan administrasi yang baik			182 Nagari	182 Nagari	182 Nagari	182 Nagari	182 Nagari	182 Nagari	182 Nagari	182 Nagari	
1.1.	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
1.2.	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa			2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
1.3.	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
1.4.	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas			-	46 Orang	45 Orang	45 Orang	-	45 Nagari	45 Orang	45 Orang	
1.5.	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa			5 Dokumen	40 Dokumen	182 Dokumen	182 Dokumen	3 Dokumen	37 Dokumen	182 Dokumen	182 Dokumen	
1.6.	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa			31 Nagari	-	47 Laporan	-	31 Nagari	-	47 Laporan	-	

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (Thn n-2)	Tahun 2022 (Thn n-1)	Tahun 2023 (Thn n)	Tahun 2024 (Thn n+1)	Tahun 2021 (Thn n-2)	Tahun 2022 (Thn n-1)	Tahun 2023 (Thn n)	Tahun 2024 (Thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.7.	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun			2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
1.8.	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa			-	1 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	-	1 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	
1.9.	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa			-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	
1.10.	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan dan Penegasan Batas Desa			59 Nagari	52 Nagari	82 Nagari	90 Nagari	50 Nagari	30 Nagari	82 Nagari	90 Nagari	
1.11.	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
IV.	Jumlah Dasawisma Maju			575 Kelompok	580 Kelompok	590 Kelompok	590 Kelompok	575 Kelompok	555 Kelompok	590 Kelompok	590 Kelompok	
1.	Jumlah Dasawisma Maju			575 Kelompok	580 Kelompok	590 Kelompok	590 Kelompok	575 Kelompok	555 Kelompok	590 Kelompok	590 Kelompok	
1.1.	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat			37 Dokumen	37 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	29 Dokumen	30 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
1.2.	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya			1269 Lembaga	1269 Lembaga	1269 Lembaga	1269 Lembaga	1269 Lembaga	1269 Lembaga	1269 Lembaga	1269 Lembaga	

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (Thn n-2)	Tahun 2022 (Thn n-1)	Tahun 2023 (Thn n)	Tahun 2024 (Thn n+1)	Tahun 2021 (Thn n-2)	Tahun 2022 (Thn n-1)	Tahun 2023 (Thn n)	Tahun 2024 (Thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.3.	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa			2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
1.4.	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
1.5.	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
V.	Indeks Keluarga Bahagia			58	59	60	61	58	59	60	61	
1.	Tersinkronisasinya Kebijakan Daerah tentang KB			-	-	2 Kebijakan	-	-	-	2 Kebijakan	-	
1.1.	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota			-	-	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	-	
2.	Tersinkronisasinya Kebijakan Daerah tentang KB			-	-	2 Kebijakan	-	-	-	2 Kebijakan	-	
2.1.	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya			-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (Thn n-2)	Tahun 2022 (Thn n-1)	Tahun 2023 (Thn n)	Tahun 2024 (Thn n+1)	Tahun 2021 (Thn n-2)	Tahun 2022 (Thn n-1)	Tahun 2023 (Thn n)	Tahun 2024 (Thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.2.	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB			-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
VI.	Angka Kelahiran Total (TFR)			2,82%	2,81%	2,80%	2,78%	2,82%	2,73%	2,80%	2,78%	
1.	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal			3 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	3 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	
1.1.	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal			1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
1.2.	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)			-	12 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	-	12 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (Thn n-2)	Tahun 2022 (Thn n-1)	Tahun 2023 (Thn n)	Tahun 2024 (Thn n+1)	Tahun 2021 (Thn n-2)	Tahun 2022 (Thn n-1)	Tahun 2023 (Thn n)	Tahun 2024 (Thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.3.	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)			15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	
1.4.	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK			-	15 Laporan	398 Laporan	398 Laporan	-	15 Laporan	398 Laporan	398 Laporan	
2.	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			54 Orang	54 Orang	54 Orang	54 Orang	54 Orang	54 Orang	54 Orang	54 Orang	
2.1.	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia			-	-	5 Unit	5 Unit	-	-	5 Unit	5 Unit	
2.2.	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)			60 Orang	60 Orang	751 Orang	751 Orang	60 Orang	60 Orang	751 Orang	751 Orang	
3.	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			33 FKTL & FKTP	33 FKTL & FKTP	33 FKTL & FKTP	33 FKTL & FKTP	33 FKTL & FKTP	33 FKTL & FKTP	33 FKTL & FKTP	33 FKTL & FKTP	

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (Thn n-2)	Tahun 2022 (Thn n-1)	Tahun 2023 (Thn n)	Tahun 2024 (Thn n+1)	Tahun 2021 (Thn n-2)	Tahun 2022 (Thn n-1)	Tahun 2023 (Thn n)	Tahun 2024 (Thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3.1.	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			12 Laporan	12 Laporan	30 Laporan	30 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	30 Laporan	30 Laporan	
3.2.	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			1500 Orang	1500 Orang	2250 Orang	2250 Orang	1325 Orang	1325 Orang	2000 Orang	2000 Orang	
3.3.	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP			-	-	15 Laporan	-	-	-	15 Laporan	-	
3.4.	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			-	-	30 Laporan	-	-	-	30 Laporan	-	
3.5.	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi			-	-	30 Orang	-	-	-	30 Orang	-	

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (Thn n-2)	Tahun 2022 (Thn n-1)	Tahun 2023 (Thn n)	Tahun 2024 (Thn n+1)	Tahun 2021 (Thn n-2)	Tahun 2022 (Thn n-1)	Tahun 2023 (Thn n)	Tahun 2024 (Thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3.6.	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria			-	-	70 Orang	-	-	-	70 Orang	-	
4.	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			31 Organisasi	31 Organisasi	31 Organisasi	31 Organisasi	31 Organisasi	31 Organisasi	31 Organisasi	31 Organisasi	
4.1.	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
VII.	Persentase Organisasi KB yang aktif			55%	57,50%	52%	52%	48%	57,50%	52%	52%	
1.	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			8 Kelompok	8 Kelompok	8 Kelompok	8 Kelompok	8 Kelompok	7 Kelompok	8 Kelompok	8 Kelompok	

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (Thn n-2)	Tahun 2022 (Thn n-1)	Tahun 2023 (Thn n)	Tahun 2024 (Thn n+1)	Tahun 2021 (Thn n-2)	Tahun 2022 (Thn n-1)	Tahun 2023 (Thn n)	Tahun 2024 (Thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.1.	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			-	-	58523 Keluarga	-	-	-	58523 Keluarga	-	

Sumber Data : Dokumen DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan Tahun 2024

Painan, 4 Agustus 2023

Kepala Dinas,



ZULKIFLI, S.Sos.

NIP.19690218 1993 03 1 003

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 merupakan Rencana Kerja Tahunan yang memuat prioritas pembangunan yang pendanaanya bersifat indikatif berdasarkan sinkronisasi melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.

Sedangkan evaluasi terhadap permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi ada tiga hal, antara lain : kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program serta hasil rencana program oleh pembangunan ekonomi yang berkualitas mengandung maksud bahwa pembangunan ekonomi harus dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat yang berdampak pada pemberdayaan masyarakat dan desa yang makin mandiri, sejahtera, berdaya saing, pengendalian penduduk, peningkatan pelayanan serta berkelanjutan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dilihat dari Rancangan Awal RKPD pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan dengan Lampiran Tabel T-C.31 sebagaimana Tabel 2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Pesisir Selatan dibawah ini :

Tabel T-C.31

Tabel 2.3.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Pesisir Selatan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
A.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Kab. Pesisir Selatan			7.063.298.476	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kab. Pesisir Selatan			10.812.512.976	
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Pesisir Selatan	Persentase Penunjang Urusan Daerah dilaksanakan	80%	5.510.902.895	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Pesisir Selatan	Persentase Penunjang Urusan Daerah dilaksanakan	80%	5.963.725.976	
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pesisir Selatan	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	20.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pesisir Selatan	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	40.000.000	
1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24 Dokumen	20.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24 Dokumen	40.000.000	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Pesisir Selatan	Persentase Tertibnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	4.611.723.613	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Pesisir Selatan	Persentase Tertibnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	5.075.449.589	
2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang / Bulan	4.500.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang / Bulan	4.963.725.976	
2.2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	111.723.613	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	111.723.613	
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Pesisir Selatan	Persentase Tertibnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	70%	1.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Pesisir Selatan	Persentase Tertibnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	70%	1.000.000	
3.1.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1.000.000	
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pesisir Selatan	Persentase Tertibnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	95%	333.628.402	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pesisir Selatan	Persentase Tertibnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	95%	333.628.402	
4.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	15.391.090	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	15.391.090	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
4.2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1.000.000	
4.3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	51.106.514	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	51.106.514	
4.4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	30.652.798	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	30.652.798	
4.5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	5.400.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	5.400.000	
4.6.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.804.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.804.000	
4.7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	209.274.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	209.274.000	
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pesisir Selatan	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	70%	1.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pesisir Selatan	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	70%	1.000.000	
5.1.	Pengadaan Mebel	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1.000.000	Pengadaan Mebel	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1.000.000	
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pesisir Selatan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	227.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pesisir Selatan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	227.000.000	
6.1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	40.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	40.000.000	
6.2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	187.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	187.000.000	
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pesisir Selatan	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	70%	336.550.880	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pesisir Selatan	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	70%	325.647.985	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
7.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	69 Unit	329.150.880	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	90.050.000	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	69 Unit	228.197.985	
7.2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	6.400.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	6.400.000	
7.3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Gedung Kantordan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Gedung Kantordan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.000.000	
II.	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	70 Nagari	35.742.300	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	70 Nagari	39.573.430	
1.	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	182 Nagari	35.742.300	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	182 Nagari	39.573.430	
1.1.	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	15 Dokumen	35.742.300	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	15 Dokumen	39.573.430	
III.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Kab. Pesisir Selatan	Persentase Nagari yang memiliki pengelolaan administrasi yang baik	90%	993.250.077	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Kab. Pesisir Selatan	Persentase Nagari yang memiliki pengelolaan administrasi yang baik	90%	3.670.810.366	
1.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Pesisir Selatan	Persentase Nagari yang memiliki pengelolaan administrasi yang baik	182 Nagari	993.250.077	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Pesisir Selatan	Persentase Nagari yang memiliki pengelolaan administrasi yang baik	182 Nagari	3.670.810.366	
1.1.	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	182 Dokumen	358.152.521	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	182 Dokumen	2.141.681.600	
1.2.	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	182 Dokumen	35.499.954	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	182 Dokumen	35.499.954	
1.3.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	182 Dokumen	44.997.700	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	182 Dokumen	44.997.700	
1.4.	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	45 Orang	37.356.000	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	45 Orang	37.356.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1.5.	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa	42 Dokumen	44.244.000	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa	42 Dokumen	45.253.710	
1.6.	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	47 Laporan	352.500.000	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	47 Laporan	1.200.000.000	
1.7.	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	182 Dokumen	15.499.902	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	2 Dokumen	15.499.902	
1.8.	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	25 Dokumen	21.000.000	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	15 Dokumen	21.000.000	
1.9.	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	35.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	35.000.000	
1.10.	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan dan Penegasan Batas Desa	82 Desa / Nagari	29.000.000	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan dan Penegasan Batas Desa	82 Desa / Nagari	74.521.500	
1.11.	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	20.000.000	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	20.000.000	
IV.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Dasawisma Maju	590 Kelompok	523.403.204	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Dasawisma Maju	590 Kelompok	1.138.403.204	
1.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Dasawisma Maju	590 Kelompok	523.403.204	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Dasawisma Maju	590 Kelompok	1.138.403.204	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1.1.	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	25 Dokumen	20.899.954	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	20.899.954	
1.2.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	68 Lembaga	150.000.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1269 Lembaga	150.000.000	
1.3.	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	59 Dokumen	52.503.250	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	52.503.250	
1.4.	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	100.000.000	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	100.000.000	
1.5.	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	15 Dokumen	200.000.000	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	815.000.000	
B.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Kab. Pesisir Selatan			125.427.500	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Kab. Pesisir Selatan			316.213.000	
I.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Kab. Pesisir Selatan	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,25%	3.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Kab. Pesisir Selatan	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,25%	3.000.000	
1.	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Kab. Pesisir Selatan	Tersinkronisasinya Kebijakan Daerah tentang KB	2 Kebijakan	1.000.000	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Kab. Pesisir Selatan	Tersinkronisasinya Kebijakan Daerah tentang KB	2 Kebijakan	1.000.000	
1.1.	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1.000.000	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
2.	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pesisir Selatan	Tersinkronisasinya Kebijakan Daerah tentang KB	2 Kebijakan	2.000.000	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pesisir Selatan	Tersinkronisasinya Kebijakan Daerah tentang KB	2 Kebijakan	2.000.000	
2.1.	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 Dokumen	1.000.000	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 Dokumen	1.000.000	
2.2.	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen	1.000.000	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen	1.000.000	
II.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Kab. Pesisir Selatan	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,78%	121.427.500	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Kab. Pesisir Selatan	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,78%	312.213.000	
1.	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Pesisir Selatan	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	4 Jenis	73.000.000	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Pesisir Selatan	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	4 Jenis	73.000.000	
1.1.	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 Dokumen	70.000.000	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2 Dokumen	70.000.000	
1.2.	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 Laporan	1.000.000	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	180 Laporan	1.000.000	
1.3.	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	15 Laporan	1.000.000	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	15 Laporan	1.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1.4.	Pengendalian Program KKBPK	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan	1.000.000	Pengendalian Program KKBPK	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	398 Laporan	1.000.000	
2.	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Kab. Pesisir Selatan	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	54 Orang	2.000.000	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Kab. Pesisir Selatan	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	54 Orang	2.000.000	
2.1.	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	5 Unit	1.000.000	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	5 Unit	1.000.000	
2.2.	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	751 Orang	1.000.000	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	751 Orang	1.000.000	
3.	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pesisir Selatan	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	33 FKTL & FKTP	6.000.000	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pesisir Selatan	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	33 FKTL & FKTP	47.785.500	
3.1.	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	1.000.000	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	30 Laporan	1.000.000	
3.2.	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	250 Orang	1.000.000	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2250 Orang	42.785.500	
3.3.	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	15 Laporan	1.000.000	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	15 Laporan	1.000.000	
3.4.	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	30 Laporan	1.000.000	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	30 Laporan	1.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
3.5.	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	30 Orang	1.000.000	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	30 Orang	1.000.000	
3.6.	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	70 Orang	1.000.000	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	70 Orang	1.000.000	
4.	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kab. Pesisir Selatan	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	31 Organisasi	40.427.500	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kab. Pesisir Selatan	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	31 Organisasi	189.427.500	
4.1.	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	1 Laporan	40.427.500	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	1 Laporan	189.427.500	
III.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Kab. Pesisir Selatan	Persentase Organisasi KB yang aktif	52,00%	1.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Kab. Pesisir Selatan	Persentase Organisasi KB yang aktif	52,00%	1.000.000	
1.	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Pesisir Selatan	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	8 Kelompok	1.000.000	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Pesisir Selatan	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	8 Kelompok	1.000.000	
1.1.	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	58523 Keluarga	1.000.000	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	58523 Keluarga	1.000.000	
Total					7.208.725.976	Total					11.168.725.976

Sumber Data : Dokumen DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan Tahun 2024

Painan, 4 Agustus 2023

Kepala Dinas,

ZULKIFLI S.Sos.
NIP. 19690218 1993 03 1 003

Berdasarkan Review terhadap Rancangan Awal RKPD, yang terdiri dari : Rancangan Awal RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan terdapat beberapa sub kegiatan tidak dapat dilaksanakan dalam pencapaian sasaran strategis dinas, hal ini disebabkan oleh pengajuan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2024 dengan Pagu Anggaran yang telah diberikan oleh Tim Anggaran Perangkat Daerah (Tim TAPD) Kabupaten Pesisir Selatan yang tidak mencukupi melaksanakan kegiatan tersebut, sehingga dilakukan efisiensi program, kegiatan dan sub kegiatan dalam pencapaian sasaran strategis dinas, dengan mengelompokkan program, kegiatan dan sub kegiatan belanja wajib, mengikat karakteristik serta sangat prioritas untuk dapat dilaksanakan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan yang terdapat dua usulan, yaitu : Usulan Pokir DPRD dan Usulan Langsung Aspirasi Masyarakat untuk Tahun 2024 maka dengan format Tabel T-C.32 sebagaimana Tabel 2.4. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Pesisir Selatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan :

Tabel 2.4.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Pesisir Selatan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Dasawisma Maju	590 Kelompok	
1.	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina	182 Lembaga	
1.1.	Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kecamatan IV Jurai	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	Kurangnya dana untuk melaksanakan kegiatan
II.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Kabupaten Pesisir Selatan	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,78%	
1.	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kabupaten Pesisir Selatan	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	15 Kampung KB	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.1.	Sub Kegiatan Pembinaan Terpadu Kampung KB	Kecamatan Pancung Soal dan Kecamatan Ranah Pesisir	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	1 Laporan	Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya KB dan Kurangnya sarana penunjang penyediaan sarana KB

Sumber Data : Dokumen DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan 2024

Painan, 4 Agustus 2023

KEPALA DINAS,



ZULKIFLI S.Sos.

NIP.19690218 1993 03 1 003

Pada usulan Musrenbang Kecamatan diharapkan untuk dapat melengkapi dokumen pendukung, sehingga kegiatan yang diusulkan dapat ditampung dalam program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan terutama untuk Pembinaan Kader PKK di Kecamatan IV Jurai dan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB di Kecamatan Pancung Soal dan Kecamatan Ranah Pesisir.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan adalah bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi dan Daerah Pesisir Selatan. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026; Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024; Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 86 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026.

Sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan bersinergi dengan dokumen perencanaan lain baik Nasional, seperti : RKP Nasional, RPJP Nasional, RPJM Nasional Tahun 2015-2020, maupun ditingkat Provinsi, seperti : RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, RPJP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005–2025, RPJM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021–2024, dan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024 mengacu pada target kinerja yang akan dicapai pada Tahun Anggaran 2024 dan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.

3.2.1. Tujuan

Tujuan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu :

“Meningkatkan Kualitas Pemerintahan Nagari dan Lembaga Kemasyarakatan serta Keluarga Berkualitas”.

3.2.2. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai untuk Tahun Anggaran 2024 diantaranya, yaitu :

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja;
2. Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah;
3. Terwujudnya Keluarga Bahagia;

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam pencapaian Visi Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan : “Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat, didukung Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional”. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan pada Misi Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan ke-1, ke-2, ke-4, ke-5 dan ke-6, yaitu :

1. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan;
2. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat;
4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan Sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Nyaman dan Berkesan;
5. Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing;
6. Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman, Tenteram dan Dinamis;

Dengan melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, yang terdiri dari 2 urusan, yaitu : Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sehingga untuk mencapai 2 urusan tersebut program dan kegiatan prioritas dinas, adalah sebagai berikut :

A. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa :

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :

Kegiatan :

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

II. Program Peningkatan Kerjasama Desa :

Kegiatan :

1. Fasilitasi Kerjasama Antar Desa;

III. Program Administrasi Pemerintahan Desa :

Kegiatan :

1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;

IV. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat :

Kegiatan :

1. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota;

B. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana :

I. Program Pengendalian Penduduk :

Kegiatan :

1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk;
2. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;

II. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) :

Kegiatan :

1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal;

2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB);
 3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota;
 4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB;
- III. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
- Kegiatan :
1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;

Sebagaimana tercantum pada Tabel T-C.33 atau Tabel 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Pesisir Selatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, adalah sebagai berikut :

Tabel T-C.33

Tabel 3.1.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Pesisir Selatan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(10)	(7)	(8)	(9)	(10)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		Kab. Pesisir Selatan		10.812.512.976	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			13.011.685.668
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Daerah dilaksanakan	Kab. Pesisir Selatan	80%	5.963.725.976	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		80%	6.927.711.780
2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pesisir Selatan	100%	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	40.000.000
2	13	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pesisir Selatan	24 Dokumen	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		24 Dokumen	40.000.000
2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertibnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Pesisir Selatan	100%	5.075.449.589	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	4.670.000.000
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pesisir Selatan	37 Orang / Bulan	4.963.725.976	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		37 Orang / Bulan	4.500.000.000
2	13	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pesisir Selatan	12 Dokumen	111.723.613	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	170.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(10)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	13	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertibnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Pesisir Selatan	70%	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		70%	49.479.280
2	13	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Pesisir Selatan	1 Paket	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	49.479.280
2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertibnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pesisir Selatan	95%	333.628.402	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		95%	854.400.000
2	13	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Pesisir Selatan	4 Paket	15.391.090	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Paket	63.000.000
2	13	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Pesisir Selatan	2 Paket	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	80.000.000
2	13	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Pesisir Selatan	3 Paket	51.106.514	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Paket	260.000.000
2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Pesisir Selatan	4 Paket	30.652.798	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Paket	65.000.000
2	13	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Pesisir Selatan	3 Dokumen	5.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	5.400.000
2	13	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Pesisir Selatan	12 Laporan	20.804.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	111.000.000
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pesisir Selatan	12 Laporan	209.274.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	270.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(10)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	Kab. Pesisir Selatan	70%	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		70%	73.782.500
2	13	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Pesisir Selatan	1 Paket	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	73.782.500
2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pesisir Selatan	100%	227.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	307.000.000
2	13	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Pesisir Selatan	12 Laporan	40.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	100.000.000
2	13	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Pesisir Selatan	12 Laporan	187.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	207.000.000
2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	Kab. Pesisir Selatan	70%	325.647.985	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		70%	973.050.000
2	13	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Pesisir Selatan	1 Unit	90.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	90.050.000
2	13	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Pesisir Selatan	69 Unit	228.197.985	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		69 Unit	320.000.000
2	13	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Pesisir Selatan	22 Unit	6.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		22 Unit	63.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(10)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	13	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantordan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Pesisir Selatan	1 Unit	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	500.000.000
2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	Kab. Pesisir Selatan	70 Nagari	39.573.430	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		70 Nagari	39.573.430
2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	Kab. Pesisir Selatan	182 Nagari	39.573.430	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		182 Nagari	39.573.430
2	13	03	2.01	02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Kab. Pesisir Selatan	1 Dokumen	39.573.430	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15 Dokumen	39.573.430
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Nagari yang memiliki pengelolaan administrasi yang baik	Kab. Pesisir Selatan	90%	3.670.810.366	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		90%	4.723.405.300
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Nagari yang memiliki pengelolaan administrasi yang baik	Kab. Pesisir Selatan	182 Nagari	3.670.810.366	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		182 Nagari	4.723.405.300
2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Pesisir Selatan	1 Dokumen	2.141.681.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	2.264.000.000
2	13	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Pesisir Selatan	2 Dokumen	35.499.954	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	97.731.100
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Pesisir Selatan	1 Dokumen	44.997.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	107.500.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(10)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	13	04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Kab. Pesisir Selatan	45 Orang	37.356.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		45 Orang	37.356.000
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa	Kab. Pesisir Selatan	182 Dokumen	45.253.710	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		182 Dokumen	173.300.000
2	13	04	2.01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab. Pesisir Selatan	47 Laporan	1.200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		47 Laporan	1.300.000.000
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	Kab. Pesisir Selatan	2 Dokumen	15.499.902	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	91.797.400
2	13	04	2.01	12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Kab. Pesisir Selatan	15 Dokumen	21.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15 Dokumen	412.500.000
2	13	04	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab. Pesisir Selatan	1 Dokumen	35.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	97.000.000
2	13	04	2.01	15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab. Pesisir Selatan	82 Desa / Nagari	74.521.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		82 Desa / Nagari	81.500.000
2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab. Pesisir Selatan	1 Dokumen	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	60.720.800

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(10)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah Dasawisma Maju	Kab. Pesisir Selatan	590 Kelompok	1.138.403.204	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		590 Kelompok	1.320.995.158
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dasawisma Maju	Kab. Pesisir Selatan	590 Kelompok	1.138.403.204	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		590 Kelompok	1.320.995.158
2	13	05	2.01	01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Kab. Pesisir Selatan	1 Dokumen	20.899.954	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	51.917.658
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Pesisir Selatan	1269 Lembaga	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1269 Lembaga	189.230.000
2	13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab. Pesisir Selatan	1 Dokumen	52.503.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	119.790.000
2	13	05	2.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Pesisir Selatan	1 Laporan	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	170.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(10)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Pesisir Selatan	1 Dokumen	815.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	790.057.500
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		Kab. Pesisir Selatan		316.213.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum dan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			7.702.186.310
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Terwujudnya Keluarga Bahagia	Kab. Pesisir Selatan	61	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum dan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		61	236.175.710
2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Tersinkronisasinya Kebijakan Daerah tentang KB	Kab. Pesisir Selatan	2 Kebijakan	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Kebijakan	101.430.710
2	14	02	2.01	02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Pesisir Selatan	1 Dokumen	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	101.430.710
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersinkronisasinya Kebijakan Daerah tentang KB	Kab. Pesisir Selatan	2 Kebijakan	2.000.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		2 Kebijakan	134.745.000
2	14	02	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Kab. Pesisir Selatan	1 Dokumen	1.000.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	2.745.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(10)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kab. Pesisir Selatan	1 Dokumen	1.000.000	DAK Non Fisik- BOKKB-BOK		1 Dokumen	132.000.000
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka Kelahiran Total (TFR)	Kab. Pesisir Selatan	2,78%	312.213.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum dan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		2,78%	5.271.850.600
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Pesisir Selatan	4 Jenis	73.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum dan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		4 Jenis	976.500.000
2	14	03	2.01	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Pesisir Selatan	2 Dokumen	70.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum dan DAK Non Fisik- BOKKB-BOK		2 Dokumen	95.000.000
2	14	03	2.01	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kab. Pesisir Selatan	180 Laporan	1.000.000	DAK Non Fisik- BOKKB-BOK		180 Laporan	234.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(10)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kab. Pesisir Selatan	15 Laporan	1.000.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		15 Laporan	607.500.000
2	14	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Kab. Pesisir Selatan	398 Laporan	1.000.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		398 Laporan	40.000.000
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Kab. Pesisir Selatan	54 Orang	2.000.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		54 Orang	2.000.000
2	14	03	2.02	02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	Kab. Pesisir Selatan	5 Unit	1.000.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		5 Unit	1.588.000.000
2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kab. Pesisir Selatan	751 Orang	1.000.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		751 Orang	873.600.000
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pesisir Selatan	33 FKTL & FKTP	47.785.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum dan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		33 FKTL & FKTP	913.573.100
2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Pesisir Selatan	30 Laporan	1.000.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		30 Laporan	55.500.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(10)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kab. Pesisir Selatan	2250 Orang	42.785.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum dan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		2250 Orang	600.008.100
2	14	03	2.03	04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Kab. Pesisir Selatan	15 Laporan	1.000.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		15 Laporan	76.725.000
2	14	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Pesisir Selatan	30 Laporan	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum dan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		30 Laporan	38.770.000
2	14	03	2.03	10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Kab. Pesisir Selatan	30 Orang	1.000.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		30 Orang	108.070.000
2	14	03	2.03	13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	Kab. Pesisir Selatan	70 Orang	1.000.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		70 Orang	34.500.000
2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kab. Pesisir Selatan	31 Organisasi	189.427.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum dan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		31 Organisasi	920.177.500

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(10)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	14	03	2.04	04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	Kab. Pesisir Selatan	1 Laporan	189.427.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum dan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Laporan	920.177.500
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Organisasi KB yang aktif	Kab. Pesisir Selatan	52,00%	1.000.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		52,00%	2.194.160.000
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Pesisir Selatan	8 Kelompok	1.000.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		8 Kelompok	2.194.160.000
2	14	04	2.01	14	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kab. Pesisir Selatan	58523 Keluarga	1.000.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		58523 Keluarga	2.194.160.000
					Total				11.148.725.976				20.753.871.978

Sumber Data : Dokumen DPMDPKKB Kab. Pesisir Selatan Tahun 2024

Painan, 4 Agustus 2023

KEPALA DINAS,



ZULKIFLI, S.Sos.

NIP.19690218 1993 03 1 003

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Rencana Kerja dan Pendanaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 merupakan program dan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai kinerja dalam upaya mencapai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan. Melalui perencanaan yang baik diharapkan dapat mencapai output kinerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dengan rencana kerja dapat dilakukan pengawasan dan evaluasi kinerja bila terjadi penyimpangan, selanjutnya dibuat strategi dalam mengatasi masalah yang terjadi, sehingga program dan kegiatan berhasil dilaksanakan. Sumber Dana Tahun Anggaran 2024 berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) serta Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik dan Non Fisik) yang digunakan pada program dan kegiatan Dinas untuk pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi merupakan upaya pengembangan sistem akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintahan Daerah diusahakan dapat membantu dan mensosialisasikan kinerja Pemerintah.

Rencana kerja berisikan program dan kegiatan sebagai instrumen pelaksanaan dari urusan Perangkat Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan memiliki 2 Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar terdiri dari : Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, selanjutnya dari urusan tersebut Rencana Kerja yang diusulkan pada Tahun 2024 terdapat program, kegiatan serta sub kegiatan guna mendukung tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.

Berdasarkan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah-Republik Indonesia (SIPD-RI) Kemendagri Tahun 2024, maka Rencana Kerja dan Pendanaan yang direncanakan untuk Tahun 2024 sebagaimana terlampir pada :

- Tabel 4.1. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Tabel 4.2. Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program
dan Kegiatan Tahun Anggaran 2024;

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA SKPD
Pemerintahan Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024	

Organisasi : 2.14.2.13.0.00.03.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

**Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
5	DELANJA DAERAH	
5 1	DELANJA OPERASI	Rp. 13.868.193.131
5 1 01	Belanja Pegawai	Rp. 4.060.231.505
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 8.707.953.626
5 1 05	Belanja Hibah	Rp. 300.000.000
5 2	DELANJA MODAL	Rp. 97.258.214
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 97.258.214
	Jumlah Belanja	Rp. 13.165.451.345
	Total Surplus / (Defisit)	(Rp. 13.165.451.345)
		Kab. Pesisir Selatan 03 - 01 - 2024 Kepala DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  NIP. 754602181933031003

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024										

Organisasi : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Tertagih	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA														
2					URUSAN PEMERINTAHAN WALID YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DAERAH									
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA									
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Penguasaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa									
2	13	04	2.01	0003	Facilitasi Penyusunan Pemerintahan Pembangunan Desa	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa		Rp. 16.393.400			Rp. 16.393.400	Rp. 40.000.000	
2	13	04	2.01	0004	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa		Rp. 25.000.000			Rp. 25.000.000	Rp. 50.000.000	
2	13	04	2.01	0006	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa		Rp. 34.487.600			Rp. 34.487.600	Rp. 50.000.000	
2	13	04	2.01	0011	Facilitasi Penyusunan Profil Desa	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa		Rp. 25.000.000			Rp. 25.000.000	Rp. 20.000.000	
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT									

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terhaga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
2	13	05	2.01		Pembudayaan Lembaga Keresayasan yang Berperan di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelecutnya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota									
2	13	05	2.01	0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel Desa		Rp. 15.480.000				Rp. 15.480.000	Rp. 25.000.000
2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Keresayasan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Penyulu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel Desa		Rp. 1.239.078.483				Rp. 1.239.078.483	Rp. 55.000.000
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
2	13	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Kab. Pesisir Selatan, IV Juru, Paman		Rp. 18.444.000				Rp. 18.444.000	Rp. 25.000.000
2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Kab. Pesisir Selatan, IV Juru, Paman		Rp. 3.934.239.505				Rp. 3.934.239.505	Rp. 4.500.000.000
2	13	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Kab. Pesisir Selatan, IV Juru, Paman		Rp. 65.264.000				Rp. 65.264.000	Rp. 80.000.000
2	13	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
2	13	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel Desa		Rp. 8.404.400				Rp. 8.404.400	Rp. 14.000.000
2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Kab. Pesisir Selatan, IV Juru, Paman		Rp. 6.158.800				Rp. 6.158.800	Rp. 15.000.000
2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Kab. Pesisir Selatan, IV Juru, Paman			Rp. 60.461.714			Rp. 60.461.714	Rp. 100.000.000
2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logika Kantor	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel Desa		Rp. 37.030.134				Rp. 37.030.134	Rp. 75.000.000

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Tertagih	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
2	13	01	2.05	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Kab. Pesisir Selatan, IV Juru, Paman	Rp. 29.450.827				Rp. 29.450.827	Rp. 40.000.000	
2	13	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Baku dan Perakitan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Kab. Pesisir Selatan, IV Juru, Paman	Rp. 1.800.000				Rp. 1.800.000	Rp. 5.400.000	
2	13	01	2.06	0008	Facilitasi Kunjungan Teknis	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Kab. Pesisir Selatan, IV Juru, Paman	Rp. 15.840.000				Rp. 15.840.000	Rp. 25.000.000	
2	13	01	2.06	0009	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua KadDesa	Rp. 169.254.000				Rp. 169.254.000	Rp. 250.000.000	
2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Mula Daerah Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah									
2	13	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Kab. Pesisir Selatan, IV Juru, Paman		Rp. 36.796.500			Rp. 36.796.500	Rp. 75.000.000	
2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah									
2	13	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Ar dan Listrik	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Kab. Pesisir Selatan, IV Juru, Paman	Rp. 40.800.000				Rp. 40.800.000	Rp. 42.500.000	
2	13	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Kab. Pesisir Selatan, IV Juru, Paman	Rp. 181.193.905				Rp. 181.193.905	Rp. 250.000.000	
2	13	01	2.09		Pemeriksaan Barang Mula Daerah Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah									
2	13	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Biaya Kendaraan Pemeliharaan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Kab. Pesisir Selatan, IV Juru, Paman	Rp. 40.800.000				Rp. 40.800.000	Rp. 45.000.000	
2	13	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Parkir dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua KadDesa	Rp. 268.160.000				Rp. 268.160.000	Rp. 300.000.000	
2	13	01	2.09	0005	Pemeriksaan Perawatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Kab. Pesisir Selatan, IV Juru, Paman	Rp. 8.350.000				Rp. 8.350.000	Rp. 8.000.000	
2	13	01	2.09	0009	Pemeriksaan/Perawatan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Kab. Pesisir Selatan, IV Juru, Paman	Rp. 18.300.000				Rp. 18.300.000	Rp. 500.000.000	
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK									
2	14	02	2.02		Pelayanan Keluarga Pengendalian Penduduk Seluruh Daerah Kabupaten/Kota									

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					Tahun + 1
								Tahun - 1	Tahun H				
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)
2	14	02	2.02	0009	Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	DAK Non Fisik BOKB-KB	Kab. Ponorogo, Seluruh Kecamatan, Semua KariDesa	Rp. 84.115.042				Rp. 84.115.042	Rp. 150.000.000
2	14	02	2.02	0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	DAK Non Fisik BOKB-KB	Kab. Ponorogo, Seluruh Kecamatan, Semua KariDesa	Rp. 109.200.000				Rp. 109.200.000	Rp. 154.200.000
2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	DAK Non Fisik BOKB-KB	Kab. Ponorogo, Seluruh Kecamatan, Semua KariDesa	Rp. 90.000.000				Rp. 90.000.000	Rp. 154.200.000
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)								
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal								
2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	DAK Non Fisik BOKB-KB	Kab. Ponorogo, Seluruh Kecamatan, Semua KariDesa	Rp. 258.999.855				Rp. 258.999.855	Rp. 200.000.000
2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Miniloka)	DAK Non Fisik BOKB-KB	Kab. Ponorogo, Seluruh Kecamatan, Semua KariDesa	Rp. 224.996.000				Rp. 224.996.000	Rp. 234.000.000
2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	DAK Non Fisik BOKB-KB	Kab. Ponorogo, Seluruh Kecamatan, Semua KariDesa	Rp. 150.000.000				Rp. 150.000.000	Rp. 230.000.000
2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangsa Kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	DAK Non Fisik BOKB-KB	Kab. Ponorogo, Seluruh Kecamatan, Semua KariDesa	Rp. 279.992.000				Rp. 279.992.000	Rp. 4.375.000
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Pelugas Lapangan KB (PKB/LP, KB)								
2	14	03	2.02	0005	Pembinaan MP dan Program Bangsa Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/LP, KB	DAK Non Fisik BOKB-KB	Kab. Ponorogo, Seluruh Kecamatan, Semua KariDesa	Rp. 546.000.000				Rp. 546.000.000	Rp. 380.000.000
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota								
2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik BOKB-KB	Kab. Ponorogo, Seluruh Kecamatan, Semua KariDesa	Rp. 44.970.555				Rp. 44.970.555	Rp. 55.500.000

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					Tahun + 1	
								Tahun + 1	Tahun N					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah (Rp)
2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesetiaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik BOKB-KB	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kai/Desa		Rp. 656.375.445				Rp. 656.375.445	Rp. 800.000.100
2	14	03	2.03	0008	Peningkatan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jaraknya	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik BOKB-KB	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kai/Desa		Rp. 61.800.000				Rp. 61.800.000	Rp. 48.425.753
2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetiaan Ber-KB									
2	14	03	2.04	0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	DAK Non Fisik BOKB-KB	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kai/Desa		Rp. 3.749.000				Rp. 3.749.000	Rp. 500.000.000
2	14	03	2.04	0004	Pemantauan Terpadu Kampung KB	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik BOKB-KB	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kai/Desa		Rp. 1.409.492.200				Rp. 1.409.492.200	Rp. 799.500.000
2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	DAK Non Fisik BOKB-KB	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kai/Desa		Rp. 2.328.600.000				Rp. 2.328.600.000	Rp. 920.177.500
Jumlah									Rp. 13.068.193.131	Rp. 97.258.214			Rp. 13.165.451.345	Rp. 11.015.796.343
									Kab. Pesisir Selatan, 02-06-2024 Kepala DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEMASYARAKATAN, PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KELUARGA BERENCANA					
														

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Tahun 2021-2026. Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Kabupaten Pesisir Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsi serta sebagai program/kegiatan Tahun 2024.

Penyusunan Renja didasarkan pada program dan kegiatan dengan berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Renja setiap Tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan feedback terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi.

Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan OPD adalah sebagai berikut :

1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja OPD.
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yang ada.
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis.
4. Mewujudkan sinergitas, efisiensi dan efektifitas perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

Untuk mengetahui efektifitas dan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan ini, akan diadakan evaluasi dan dipertanggungjawabkan kepada Bupati Pesisir Selatan.

BUPATI PESISIR SELATAN,



SUSMA YULIANWAR